
PENATAAN KONFLIK ANTAR DESA DI KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Oleh

Dwi Putri Yuliani¹, Lalu Satria Utama², Syaefullah³, Abdurahman⁴

^{1,2,3,4}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: ¹dwiputriyuliani07@gmail.com, ²Satriabideko@gmail.com,

³syaefullahishak1967@gmail.com, ⁴abdurahman@ipdn.ac.id

Article History:

Received: 28-12-2024

Revised: 07-01-2024

Accepted: 23-01-2025

Keywords:

Konflik Sosial, Kearifan Lokal, Penataan Konflik, Kota Mataram, Resolusi Konflik

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi deteksi dini, respon pemerintah, dan model penataan konflik sosial antar kampung di Kota Mataram, khususnya antara Kampung Monjok Culik dan Karang Taliwang. Konflik berkepanjangan yang sering terjadi di wilayah ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan sosial, budaya, dan agama, serta masalah komunikasi antar kelompok. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi efektivitas strategi penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dan intervensi pemerintah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup peringatan dini, mediasi, dan pendidikan multikultural. Selain itu, kearifan lokal, seperti tradisi dan nilai-nilai budaya, berperan penting dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran signifikan dalam menyediakan kebijakan yang mendukung pencegahan konflik melalui penguatan regulasi, fasilitasi dialog antar kelompok, dan pembentukan satuan tugas terpadu. Studi ini merekomendasikan model penataan konflik berbasis kearifan lokal yang menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan kelompok lokal untuk menciptakan harmoni sosial di Kota Mataram.

PENDAHULUAN

Berbagai persoalan mengenai keamanan, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat kerap terjadi menghiiasi pemberitaan di media masa maupun media sosial. Mulai dari persoalan sosial, keagamaan, hingga perbedaan perselisihan pendapat yang menimbulkan konflik sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, tertulis bahwa konflik sosial, yang selanjutnya disebut konflik,

adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Pengalaman penyelenggaraan desentralisasi di Kota Mataram, tepatnya pada tanggal 17 Januari 2000 selama tiga hari, terjadi kerusuhan agama yang cepat berubah menjadi kekerasan etnis¹. Setelah 15 Tahun, Kota Mataram masih mencoba membangkitkan stabilitas sosial dan ekonomi pascakerusuhan agama—muncul konflik sosial yang terjadi antara Kelurahan Monjok dengan Karang Taliwang pada tahun 2015 sampai 2023, apakah menjadi pertanda ketidakstabilan sosial di Kota Mataram?

Dilansir dari website Satu Data NTB (data.ntbprov.go.id) konflik sosial yang telah terjadi di Kota Mataram, salah satunya merupakan bentrokan yang berkepanjangan antar warga lingkungan Monjok Culik dengan Karang Taliwang pertama kali pada tahun 2015 yang disebabkan oleh kesalahpahaman dan bermula ketika warga Monjok Culik merusak sebuah container sampah yang berada di perbatasan wilayah antara lingkungan Monjok Culik dengan lingkungan Karang Taliwang yang kemudian dibalas oleh lingkungan Karang Taliwang. Warga Karang Taliwang melakukan aksi pembalasan dengan merobohkan tembok pemakaman warga lingkungan Monjok. Dimulai dari ini, setiap adanya perbedaan pendapat ataupun pemahaman, pasti akan berujung pada terjadinya bentrokan kembali. Pada tahun 2023, bentrokan kembali terjadi akibat terganggunya warga Monjok Culik akibat ledakan petasan di lingkungan Monjok Culik oleh orang tak dikenal yang membuat warga gerombolan untuk mengepung jalan sekitar lingkungan Karang Taliwang.

Bentrokan lingkungan Monjok Culik dan Karang Taliwang telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana warga yang tinggal diperbatasan merasa terganggu dan tidak nyaman akibat selalu terjadi keributan dari kedua lingkungan tersebut, bahkan warga juga merasa takut karena bentrokan atau konflik yang terjadi sampai menggunakan senjata rakitan dan senjata tajam untuk tawuran, seperti anak panah, pisau atau golok, tombak, pistol rakitan, dan lain-lain. Sehingga perlu dilakukan penyelesaian dan pencegahan konflik sosial ini, walaupun konflik disebut sebagai hal yang biasa terjadi di kehidupan manusia.

Pemerintah Kota Mataram seharusnya dapat mewujudkan daerah ibukota provinsi ini sebagai daerah yang aman terutama dari konflik sosial sehingga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat terwujud. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram guna menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Diantaranya, melakukan sosialisasi, mediasi dengan pihak yang berkonflik, memberi bantuan kebutuhan dengan pihak yang berkonflik, dan lainnya. Seperti hal yang dilakukan pada lingkungan Monjok Culik dan Karang Taliwang, pemerintah memberikan pemahaman bahwa perseteruan dan perpecahan jauh dari nilai agama dan sosial budaya masyarakat Kota Mataram, memfasilitasi perdamaian dari kedua belah pihak, dan memberikan peralatan olahraga kepada kedua belah pihak.

Konflik sosial yang terjadi di Kota Mataram, selalu bermula dari perbedaan-perbedaan kepentingan yang ada. Bahkan jika melihat pada sejarahnya, konflik sosial di Kota Mataram

¹ Jamil Gunawan, Sutoro Eko Yunanto, Anton Birowo, & Bambang Purwanto, “Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal”, Pustaka LP3ES Indonesia Jakarta, 2005, h. 177.

bermula dari perbedaan etnis, budaya, serta agama. Keragaman ini terindikasi menimbulkan kerawanan yang berdampak pada timbulnya konflik. Dari hasil penelitian Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia (2002), bahwa kota Mataram yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, dan etnis lain terutama suku Bali, Buton, dan Manado merupakan penganut agama yang berbeda dengan masyarakat (mayoritas). Pemeluk agama Islam (76,47 %), sisanya pemeluk agama Hindu (17,55%), Kristen (2,5%), dan Budha (2%). Agar konflik tidak berlanjut ke masa mendatang, pemerintah memberikan penyadaran tentang pentingnya menjaga persatuan toleransi masyarakat yang berbeda agama dan etnik.

Berbicara mengenai perbedaan budaya, tentunya budaya yang ada di Kota Mataram sangatlah beragam namun masih menjadi masalah ketika nilai-nilai budaya lokal sudah mulai ditinggalkan dan tidak familiar lagi dengan masyarakat Kota Mataram. Didalam RPJMD Kota Mataram 2021-2025, yang menjadi salah satu permasalahan adalah nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra serta kearifan lokal belum dilestarikan dan diaktualisasikan dalam pembangunan secara optimal.

Walaupun berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dan perdamaian telah dilakukan, bukan berarti konflik antara lingkungan Monjok Culik dan Karang Taliwang selesai begitu saja. Pada tahun 2023, bentrokan kembali terjadi pada hari minggu malam. Penyebab kembalinya bentrok pada saat itu belum diketahui pasti, namun warga dari kedua lingkungan sudah memadati ruas jalan dengan membawa senjata tajam. Dari kasus ini, pemerintah harus meningkatkan perhatian kepada konflik-konflik yang terjadi. Bentuk pencegahan perlu dilakukan pemerintah, agar ketika sebuah konflik sudah terjadi dan diselesaikan, jangan sampai hal ini terulang kembali terutama pada konflik yang sama. Melihat Kota Mataram mempunyai berbagai jenis masyarakat yang tinggal dengan latar belakang suku dan budaya yang beragam, sebuah nilai kearifan lokal dapat menjadi suatu langkah dalam melakukan penyelesaian dan pencegahan konflik dan ini juga sebagai bentuk pelestarian budaya daerah.

Dalam *International Conference on Social Representations* 1992, Mosconi (dalam Utama dan Rahman, 2022) memiliki pendapat dimana pendekatan representasi sosial yang bersifat dialogis lebih mengedepankan komunikasi dengan bahasa lokal serta memperhatikan karakteristik komunikasi budaya setempat atau kearifan lokal. Namun, di Kota Mataram masih kurang memanfaatkan kearifan lokal dalam penataan konflik tersebut. (*antaranews.com*, 2022) Polda NTB mendorong pemerintah untuk membentuk satuan tugas terpadu dalam penanganan konflik sosial sehingga memudahkan dalam koordinasi dalam upaya penanganan konflik sosial yang muncul, serta penataan konflik melalui regulasi kebijakan, pemberhentian kekerasan, dan pascakonflik dengan rehabilitasi.

Tim menganggap bahwa nilai-nilai budaya masyarakat dan berbagai perhatian pemerintah dalam penataan konflik yang terjadi mampu berperan dalam upaya pencegahan konflik dengan melihat bahwa masyarakat di Kota Mataram terdiri dari suku, etnik, dan budaya yang beragam. Oleh karena itu, tim peneliti mengusulkan judul penelitian **MODEL PENATAAN KONFLIK ANTAR DESA DI KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

LANDASAN TEORI

Fungsi Pemerintahan Bidang Perlindungan Masyarakat

Pemerintahan memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Adanya perlindungan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bertujuan untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, serta rasa aman pada masyarakat. Hal tersebut merupakan fungsi yang paling mendasar dalam pemerintahan karena terlaksananya perlindungan masyarakat adalah salah satu syarat yang harus terpenuhi agar kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. (Hafis Nurcholis, 2005)

Konsep Konflik

Adapun Simon Fisher (2000), mendefinisikan konflik adalah *Conflict is a relationship between two or more parties (individuals or group) who have, or think they have, incompatible goals*, hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau mereka mengganggu memiliki tujuan yang bertentangan.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan keadaan yang dinamis, tertib, dan tenteram dalam kehidupan di daerah. Tujuan tersebut tertera pada pasal 3 ayat (1) undang-undang ini, dimana ini merupakan kewenangan pemerintah yang telah tertera sebagai urusan pemerintahan wajib. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa tujuan pengaturan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah untuk :

- a. Menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara aman, tertib, dan teratur
- b. Melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- c. Mewujudkan penegakan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan lainnya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- d. Menumbuhkan kesadaran serta budaya tertib dan teratur dalam tata kehidupan bermasyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- e. Mendukung terciptanya ketahanan nasional

Kemudian, pada pasal 4 ayat (2) poin c dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas kabupaten/kota. Dimana salah satu gangguan ketenteraman dan ketertiban umum ialah konflik sosial.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif menurut Creswell dalam Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (2011) menyatakan bahwa "penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami". Dalam penelitian kualitatif untuk melakukan analisis data lebih cenderung secara induktif. Dalam artian bahwa analisis akan dituangkan dan disusun mulai dari pendapat yang sifatnya khusus atau spesifik

menjadi pendapat yang bersifat umum yang nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan dari objek yang diteliti.

Berdasarkan pendapat ahli yang dijelaskan di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pendekatan penelitian dengan metode kualitatif merupakan metode yang bertujuan untuk meneliti keadaan ilmiah suatu objek yang saling terkait dalam satu kesatuan dengan menyertakan peneliti sebagai instrumen penelitian. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian akan ditarik kesimpulan secara induktif. Pendekatan secara induktif adalah upaya untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan di lapangan secara sistematis, terperinci, akurat sengan disertai fakta-fakta yang saling berhubungan.

Sumber Data

Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti mengacu pada konsep sumber data menurut Arikunto (2010:177), yang mengatakan pembagian dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu sumber data yang langsung diperoleh dan digunakan oleh pengumpul data. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu data yang ditetapkan secara langsung dari kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram berawal dari komunikasi wawancara dengan kepala badan, camat, lurah, dan beberapa masyarakat desa yang pernah terlibat dalam konflik sosial, yang kemudian diadakan wawancara secara berkelanjutan ketika hendak melakukan penelitian langsung di lapangan. Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data bagi pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yaitu data yang ditemukan melalui dokumen, artikel, berita, dan jurnal serta informasi tambahan lainnya yang mempunyai hubungan relevan dengan masalah yang hendak diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Strategi Deteksi Dini Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Antar Kampung Monjok Culik dan Karang Taliwang

Deteksi dini atau peringatan dini merupakan konsep yang biasanya digunakan dalam konteks menghindari bencana alam. Konsep ini telah menjadi sentral dalam studi pencegahan konflik juga sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari konflik kekerasan yang mungkin terjadi². Deteksi dini dan mitigasi konflik sosial sangat penting untuk menjaga ketahanan daerah dan mencegah kekerasan. Oleh karena itu, langkah awal yang harus dilakukan dalam mitigasi konflik sosial adalah menemukan dan menganalisis permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik dan menentukan langkah strategis pencegahan dini yang harus diimplementasikan secara konsisten. Dengan analisis masalah dan pengembangan strategi awal dalam pencegahan konflik ini, maka akan lebih mengetahui penyebab dan dinamika konflik yang terjadi di masyarakat.

Analisis 1. Perbedaan Identitas

Asumsi peneliti bahwa konflik Monta lebih kepada perspektif kegagalan akulturasi budaya. Teori konflik menyatakan bahwa dari adanya perbedaan yang ada didalam kehidupan sehari-hari seperti perbedaaan budaya, kepentingan, nilai, kebutuhan,

² Sri Widodo Mulyono, "Optimalisasi Kemampuan Deteksi Dini dan Mitigasi Risiko Konflik Oleh Satuan Koramil Dalam Pencegahan Terjadinya Konflik Sosial dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Koramil 05/Pasar Kliwon, Kodim 0735/Surakarta, Jawa Tengah)", *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(3), 2015, 188-196.

pemahaman, dan pola-pola perilaku individu maupun kelompok yang ada di dalam masyarakat bisa memuncak menjadi sebuah konflik sosial ketika sistem sosial masyarakatnya tidak bisa mengakomodasi perbedaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri³. Kemudian ketika kondisi "pemerintah lemah" upaya deteksi dini dan pengambilan keputusan yang cepat dan tindakan tegas dalam penyelesaian konflik⁴, maka besar kemungkinannya konflik akan terus menerus terjadi, bahkan menjadi konflik yang sulit terselesaikan. Dengan demikian akar permasalahan konflik Monta yang pertama adalah karena perbedaan identitas dan lemahnya kemampuan dalam pengelolaan perbedaan berbagai identitas di masyarakat. Potensi konflik yang dapat muncul dari perbedaan identitas ini adalah kekerasan budaya, kekerasan struktural dan kekerasan langsung⁵.

Strategi yang dilakukan untuk penyelesaian dan pencegahan konflik identitas etnis setidak-tidaknya meliputi empat strategi, yaitu:

- 1) Mengadakan sesi dialog antarbudaya yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan pemimpin agama dari kedua komunitas untuk membuka ruang bagi pemahaman bersama dan penghargaan terhadap keunikan budaya masing-masing, untuk dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan toleransi.
- 2) Penyelenggaraan sistem pendidikan yang inklusif dan multikultural kepada anak muda untuk menghormati perbedaan dan keberagaman budaya, sejarah lokal, dan nilai-nilai kerjasama dalam keberagaman dan toleransi.
- 3) Mediasi dan rekonsiliasi bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, serta memperbaiki hubungan yang rusak melalui kegiatan-kegiatan bersama yang membangun kepercayaan.
- 4) Membangun kesadaran kolektif untuk pelaksanaan program-program yang dapat mengurangi perpecahan identitas, seperti festival budaya kota, olahraga bersama, dan proyek-proyek pembangunan komunitas yang dapat menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat kohesi sosial.

Analisis 2: Ketidaksetaraan Ekonomi

Potensi-potensi Karang Taliwang lebih mudah bisa dijual dari pada potensi-potensi Monjok, misalnya katakan saja sektor pariwisata, setiap adanya evan-evan motor-GP dan evan-evan lainnya yang diadakan di NTB, maka akan berdampak kepada sentuhan-sentuhan dan dukungan lebih dari privat sektor dan pemerintah ke Karang Taliwang untuk mendukung evan-evan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya beragam tempat kuliner yang berkaitan dengan pariwisata dan identitas masyarakat Karang Taliwang sendiri.

Analisis tersebut memandang bahwa wilayah Karang Taliwang memang lebih maju daripada wilayah Monjok dari sisi ekonomi, dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor pemicu pergesekan di antara mereka. Selain itu, potensi pariwisata yang dikembangkan oleh masyarakat akan berdampak pada pemberian insentif atau dukungan lebih. Hal ini ditakutkan akan menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga konflik dapat muncul setiap

³ Soejono Sukanto, "*Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*", Mitra Wacana Media Jakarta, 2014, h.56

⁴ Bambang istianto, "Potret Buram Politik Indonesia", Mitra Wacana Media Jakarta, 2014, h.238

⁵ Novri Susan, "Pengantar Sosiologi Konflik", Prenadamedia Group Jakarta, 2014, h.109

ada provokasi langsung antar dua pihak. Sehingga kesenjangan ekonomi berpengaruh pada identitas sosial yang dibentuk⁶.

Oleh karena itu, potensi-potensi untuk bekerjasama dalam mengembangkan ekonomi dengan keterlibatan kedua belah pihak sebagai upaya harmonisasi antara masyarakat Monjok dan Karang Taliwang perlu dilakukan secara komprehensif dan inklusif, dengan dua strategi, yaitu: pemberdayaan ekonomi rakyat lewat kewirausahaan dan menumbuhkan hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Pembinaan kewirausahaan berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan usaha dan pemasarannya, sehingga akan tercipta lapangan kerja baru yang bisa menampung sejumlah tenaga kerja. Sedangkan menumbuhkan kembali hubungan yang harmonis merupakan komitmen bersama untuk membangun solidaritas yang melandasi terciptanya perasaan satu ikatan batin diantara mereka untuk mencapai suatu tujuan dan visi yang disepakati bersama. Modal sosial yang saling menyayangi, saling menghormati, dan saling memberi, jika dipupuk dengan baik akan menjadi kekuatan solidaritas masyarakat yang hebat⁷. Diharapkan mampu memfilter dan menangkang pengaruh sisi buruk yang bisa memecahbelah masyarakat.

Potensi konflik yang dapat muncul dari ketidaksetaraan ekonomi ini adalah kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Strategi yang dapat dilakukan untuk konflik karena ketidaksetaraan ekonomi, sekurang-kurangnya dengan tiga strategi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan program-program ekonomi berkelanjutan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), memberikan pelatihan keterampilan, dan meningkatkan akses modal bagi masyarakat, agar dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata.
- 2) Pemberdayaan masyarakat lokal yang mencakup pendidikan vokasional, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan koperasi untuk dapat meningkatkan kondisi ekonomi, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam mengatasi masalah ekonomi.
- 3) Kolaborasi sektor publik dan swasta untuk proyek-proyek bersama untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata lokal dan investasi dalam sektor-sektor strategis, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Analisis 3: Mobilisasi Konflik Masyarakat

Konflik Monta sering dipicu oleh politisasi identitas dan kepentingan yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memobilisasi massa secara destruktif⁸. Dinamika politik dan keanekaragaman identitas seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menyebabkan berbagai konflik horizontal dan vertikal yang terjadi di Indonesia. Terlebih lagi, hal ini semakin diperparah dengan hadirnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan identitas dan pandangannya masing-masing yang saling bertentangan. Menguatnya polarisasi masyarakat Indonesia terhadap suatu identitas tertentu telah berdampak pada penguatan politik identitas.

⁶ Syarifah Nurhasanah Jamalullail, Ilmiatun Hadiati, Aldis Priya Anggaraksa, Anang Fakhurrahman, Anggun Aulia Putri, dan Lalu Ahmad Hatami, Loc.Cit, h. 9

⁷ Bambang Istianto, "Potret Buram Politik Indonesia", Mitra Wacana Media Jakarta, 2014, h.239

⁸ Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa, "Konflik Sosial dan Politik Identitas sebagai Kecacatan Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017", *Deviance Jurnal Kriminologi*, 7(1), 2023, 81-100, DOI: <http://dx.doi.org/10.36080/djk.2356>

Konflik ini umumnya berlangsung dalam jangka waktu panjang. Konflik yang tidak dapat diselesaikan telah diteorikan pertama kali oleh Edward Azar, yang mengembangkan konsep "*Protracted Social Conflict*". Proposisi Azar menunjukkan bahwa masyarakat dengan komposisi multi-komunal lebih rentan terhadap konflik sosial yang berkepanjangan. Dalam konteks konflik Monta, komposisi komunal memiliki nada kesukuan yang kuat, dengan berbagai komunitas sosial budaya dan etnis yang tinggal di wilayah tersebut⁹. Lebih lanjut Azar menjelaskan karakteristik dan dinamika konflik yang berlangsung lama, yaitu:

- 1) Sering kali berakar pada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, seperti keamanan, identitas, pengakuan, dan partisipasi politik. Ketidakmampuan atau ketidakmauan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ini dapat memicu dan memperpanjang konflik.
- 2) Melibatkan aktor-aktor eksternal yang memiliki kepentingan tertentu dalam mempertahankan konflik. Bantuan dari aktor eksternal dapat memperpanjang durasi konflik.
- 3) Sering terjadi pada masyarakat yang terfragmentasi secara sosial dan politik berdasarkan etnis, agama, atau ideologi dapat memperkuat dan memperpanjang konflik.
- 4) Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, kekuasaan, dan sumber daya dapat menciptakan kondisi yang mendukung konflik jangka panjang. Sistem politik dan ekonomi yang tidak adil dapat memperpanjang ketegangan dan memicu kekerasan yang berkelanjutan¹⁰.

Politisasi konflik masyarakat merujuk pada penggunaan konflik oleh aktor politik untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, yang sering kali memperburuk situasi dan memperpanjang ketegangan. Untuk menangkal politisasi konflik, diperlukan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi. Strategi yang dapat dilakukan untuk mitigasi konflik terhadap mobilisasi konflik masyarakat adalah:

- 1) Membangun dialog inklusif dan partisipatif untuk membuka ruang bagi semua kelompok dalam rangka menyuarakan pandangan dan keprihatinan mereka, menciptakan rasa saling pengertian dan kepercayaan semua kelompok.
- 2) Pemulihan hubungan sosial melalui pendekatan *restorative justice* untuk memperkuat ikatan sosial antar kelompok, menghilangkan dendam, mengakui kesalahan, memperbaiki kerusakan dan mencari solusi bersama.
- 3) Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin agama dan lembaga adat dalam mediasi konflik dapat memperkuat legitimasi proses mediasi dan meningkatkan kemungkinan keberhasilannya.
- 4) Membangun budaya damai melalui pendidikan perdamaian dan kesadaran multikultural bagi generasi muda agar dapat memahami nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap keberagaman dan keterampilan resolusi konflik.
- 5) Peningkatan kolaborasi antar institusi pemerintah dan non-pemerintah secara terpadu dan menyeluruh dalam mengelola konflik, sehingga memungkinkan berbagai sumber daya dan keahlian dalam penanggulangan konflik.

⁹ Qurat-Ul-Ain Shabbir & Shabana Fayyaz, "Unravelling the Correlation of Intractability and Human Security in the Kashmir Conflict: An Analysis using Edward Azar's Social Protracted Conflict Theory", *Global Foreign Policies Review (GFPR)*, 6(2), 2023, 35-52.

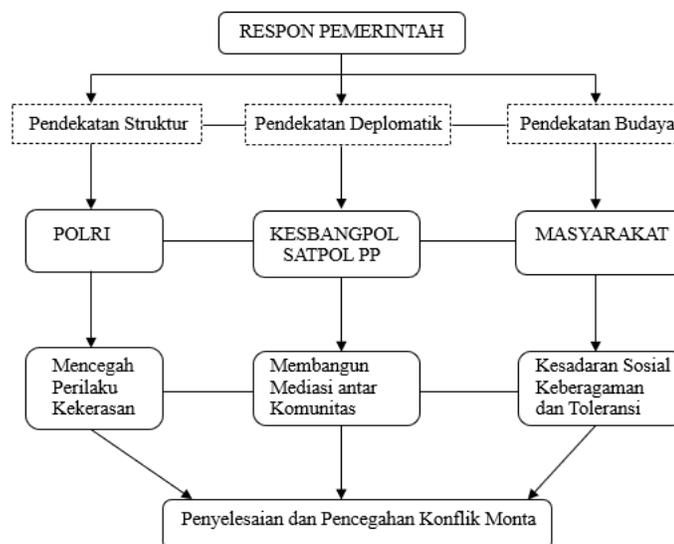
¹⁰ Qurat-Ul-Ain Shabbir & Shabana Fayyaz, idem, h.52

- 6) Membangun sistem yang mampu mendeteksi tanda-tanda awal konflik dan politisasi, seperti perubahan dalam retorika politik, peningkatan ketegangan sosial, dan tindakan provokatif.
- 7) Membangun jaringan sosial yang kuat di antara kelompok-kelompok masyarakat untuk meningkatkan solidaritas dan kerjasama dalam mengatasi konflik.

Respon Pemerintah dalam Sistem Penyelesaian dan Pencegahan Konflik Antar Kampung Monjok Culik dan Karang Taliwang di Kota Mataram

Respon sistem penyelesaian dan pencegahan konflik sosial merujuk pada pendekatan terstruktur yang diterapkan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengatasi konflik, serta mencegah terjadinya kembali konflik antar komunitas. Johan Galtung menciptakan tiga dimensi kekerasan, yaitu kekerasan struktural, kultural dan langsung. Kekerasan struktural tercipta dari penggunaan kekuasaan struktural, seperti seseorang yang memiliki wewenang

Dalam konteks kampung Monjok dan Karang Taliwang di Kota Mataram, respon sistem ini mencakup pendekatan dan langkah-langkah terkoordinasi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menjaga stabilitas sosial dan harmoni antar komunitas, antara lain mencakup tiga pendekatan, yaitu pendekatan struktural, pendekatan budaya dan pendekatan diplomatik.



Gambar 1. Respon Pemerintah Terhadap Penyelesaian dan Pencegahan Konflik Monta

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Deteksi Dini untuk Penyelesaian dan Pencegahan Konflik Antar Kampung Monjok dan Karang Taliwang di Kota Mataram
2. Respon Pemerintah dalam Sistem Penyelesaian dan Pencegahan Konflik Antar Kampung Monjok dan Karang Taliwang di Kota Mataram
3. Model Penataan Konflik Antar Kampung Monjok dan Karang Taliwang di Kota Mataram

Saran

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan yang penulis kemukakan maka saran dari penulis adalah :

1. Diharapkan peningkatan komunikasi antara pemerintah daerah Kota Mataram dengan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat sebagai modal awal dalam menjaga keharmonisan di lingkungan masyarakat. Komunikasi dan menjaga silaturahmi setiap elemen dapat meningkatkan toleransi yang berujung pada kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Dialog aktif dengan tokoh-tokoh yang dituakan di daerah harus tetap dilakukan agar pemerintah dengan masyarakat memiliki pemahaman yang sama, untuk daerahnya kedepan.
2. Peran pemerintah daerah Kota Mataram, terutama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu ditingkatkan dalam hal deteksi dini melalui peran intel dalam menemukan berbagai akar permasalahan dan sumber permasalahan serta mencari para provokator agar dapat segera diselesaikan sebelum sumber permasalahan menjadi konflik terbuka atau konflik sosial.
3. Kearifan lokal yang sudah dimanfaatkan dengan baik dalam pengelolaan konflik sosial perlu ditingkatkan kembali oleh pemerintah daerah Kota Mataram serta lebih banyak melibatkan pemuda-pemuda dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat sehingga mereka lupa bahwa mereka pernah berkonflik. Sosialisasi melalui tokoh-tokoh agama dan kegiatan nuansa keagamaan sebagai karakteristik khas kedua lingkungan dapat digunakan sebagai sarana memberikan Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, I. (2008). *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM
- [2] Achmad, U dan Tajudin. (2014). *Suluk Kiai Cebolek; Dalam Konflik Keberagaman dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Prenada
- [3] Alamsyah, Kamal, 2016. *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- [4] Ali, Faried, & Alam A. S., 2012. *Studi Kebijakan Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [5] Andhika, L. R., 2019. *Permodelan Kebijakan Publik: Tinjauan dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah*. *Jurnal Riset Pembangunan* 2 (1): 22-35.
- [6] Anggara, Sahya, 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- [7] Bercovith, J dan Richard Jackson. (2009). *Conflict Resolution in The Twenty First Century (Principles Methods and Approaches)*. United States: The University of Michian Press
- [8] Estrada, M. A., & Park, D., 2018. *The Past, Present and Future of Policy Modeling*. *Journal of Policy Modeling*, 40(1), 1-15.
- [9] Fisher, Simon. (2000). *Working With Conflict: Skills and Strategies for Action*. London: Zed Book Ltd
- [10] Halim, A., 2013. *Regional Development Policy Model Left Behind Case Study Supiori Papua Province*. *Jurnal Humanity* 8(2): 1-12.
- [11] Hill, M., 2005. *The Public Policy Process (4th ed.)*. Essex: Pearson Education

- [12] Indiahono, Dwiyanto, 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta: Gava Media.
- [13] Ismi, Anisa, 2021. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Long Kali. Ejournal Ilmu Pemerintahan 9(2): 103-112.
- [14] Jeddawi, M., & Rahman, A. (2020). Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Permasalahan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Konstituen, 2(2), 89-100.
- [15] Kusumanegara, S., 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media
- [16] Lathifan, L., Nugraha, C., Kusmaningrum, 2014. Pemodelan Matematis Untuk Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati Biodisel dari Kemiri Sunan. Reka Integra Institut Teknologi Nasional 4(2): 61-72
- [17] Liliweri, Alo. (2005). Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural. Yogyakarta: PT. Lkis Printing
- [18] Madjid, N. (1995). Islam Agama Peradaban. Jakarta: Paramadina
- [19] Moleong, L. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- [20] Muadz, Husni, 2014. Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas, Relasi Intersubektivitas dengan Pendekatan Sistem. Mataram: Institut Pembelajaran Gelar Hidup (IPGH)
- [21] Muhadjir, Noeng, 2000. Kebijakan dan Perencanaan sosial Pengembangan Sumber Daya Manusia. Telaah Cross Discipline. Edisi I. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- [22] Nawari, I. (2015). Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam. Yogyakarta: Samudra Biru.
- [23] Nazir. (2017). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
- [24] Noor, J. (2011). Metodologi Penelitian, Pertama. Jakarta: Kharisma Putra Utama
- [25] Nugroho, Riant, 2012. Public policy. Jakarta: PT. Elex Media Computendo.
- [26] Nurcholis, H. (2005). Hanif Nurcholis, Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo
- [27] Rahman, A., & Bakri, R. (2020). Efektifitas Lembaga Adat Dalam Rangka Pelestarian Hutan Gunung Kiyangan Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal PALLANGGA PRAJA, 2(1), 43-57
- [28] Parsons, Wayne, 2011. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- [29] Santoso, Purwo, 2010. Modul Pembelajaran Analsis Kebijakan Publik. Yogyakarta: UGM
- [30] Sartini. (2004). Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati. Jurnal filsafat Jilid 37 Nomor 2, h.111
- [31] Soekanto, S. (1985). Kamus Sosiologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- [32] Soekanto, S. (1988). Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi. Jakarta: Sinar Grafika
- [33] Soemardjan, S dkk. (1974). Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- [34] Subarsono, Agustinus, 2016. Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Gava media.
- [35] Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- [36] Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta

- [37] Suharsimin, A. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- [38] Suharto, Edi, 2014. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- [39] Sukendar dkk. (2010). *Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*. Semarang: Lembaga Pusat Penelitian (PUSLIT) IAIN Walisongo Semarang
- [40] Sumaryadi, I. Nyoman, 2016. *Reformasi birokrasi Pemerintahan menuju tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bogor: Galia Indonesia.
- [41] Suwitri, Sri, 2007. *Analisis Kebijakan Publik. Modul 1*. Jakarta: Universitas Terbuka
- [42] Swantrom, N dan Weissman. (2005). *Conflict, Conflict Prevention, Conflict Management, and Beyonce a Conceptual Exploration*. Swedden: Upspsala
- [43] Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Wahab, S. Abdul, 2010. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- [44] Triyono, L. (2007). *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- [45] Tumanggor, R. (2007). *Pemberdayaan Kearifan Lokal Memacu Kesetaraan Komunitas Adat Terpencil*. *Jurnal Penelitian XII* 01
- [46] Yunus, R. (2014). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris Tetang Huyula*. Yogyakarta: Deepublish
- [47] Muhammad Harfin Zuhdi, "Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Lombok"
- [48] William Hendricks, "Bagaimana Mengelola konflik Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik yang Efektif" Bumi Aksara Jakarta, 2012, h.15
- [49] M. Ilham & Abdul Rahman, "Praktik Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum", PT. Pustaka Interes Media Amani, 2023, h. 86
- [50] Wisnu Indrajit Vo dan Soimin, "Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan: Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan", Intrans Publishing Malang, 2014, h. 10
- [51] Syarifah Nurhasanah Jamalullail, Ilmiatun Hadiati, Aldis Priya Anggaraksa, Anang Fakhurrahman, Anggun Aulia Putri, dan Lalu Ahmad Hatami, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Konflik Antara Monjok dan Karang Taliwang: Perbedaan Identitas dan Perbedaan Sektor Ekonomi", *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, 5(2), 2023, 1-17..
- [52] Azhari, Yulian & Wilopo, "Pencegahan Potensi Konflik Antara Pengungsi Rohingya dan Masyarakat Lokal Indonesia", *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(3), 2022, 475-488
- [53] Sakaria Anwar, "Membangun Kembali Perdamaian: Rekonsiliasi Konflik Komunal Berbasis Trust", *Jurnal Kesehatan Masyarakat maritim* 1(1), 2015, 133-142
- [54] I Yoman Sudira, "Dialog Dalam resolusi Konflik-interaktif", *Jurnal Ilmiah hubungan Internasional*, 12(1), 2016, 33-42
- [55] Edison & Muhammad Ardiyansyah, "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan di Indonesia", *Jurnal development*, 11(2), 2023, 134-147

- [56] Andi Agustang; Sulaeman Samad; Andi Asrifan, "Interaksi Sosial Komunitas Lokal Dengan Pendatang dan Perubahan Struktur Komunitas Lokal (Studi pada Masyarakat Majemuk di Kawasan Industri Makassar)", OSFPREPRINTS, 2021, DOI:10.31219/osf.io/pw5xr
- [57] Qurat-UI-Ain Shabbir & Shabana Fayyaz, "Unravelling the Correlation of Intractability and Human Security in the Kashmir Conflict: An Analysis using Edward Azar's Social Protracted Conflict Theory", Global Foreign Policies Review (GFPR), 6(2), 2023, 35-52
- [58] Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa, "Konflik Sosial dan Politik Identitas sebagai Kecacatan Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017", Deviance Jurnal Kriminologi, 7(1), 2023, 81-100, DOI: <http://dx.doi.org/10.36080/djk.2356>
- [59] Jacob Bercovith & Richard Jackson, "Conflict Resolution in The Twenty First Century (Principles Methods and Approaches)". The University of Michian Press United States, 2009. h. 91
- [60] Leo Agustino, Politik Lokal dan Otonomi Daerah", Alfabeta Bandung, 2014, h, 157
- [61] Syarifah Nurhasanah Jamalullail, Ilmiatun Hadiati, Aldis Priya Anggaraksa, Anang Fakhurrahman, Anggun Aulia Putri, dan Lalu Ahmad Hatami, Loc.Cit, h. 9
- [62] Bambang Istianto, "Potret Buram Politik Indonesia", Mitra Wacana Media Jakarta, 2014, h.239
- [63] Agung Minto Wahyu, Panji Galih Anugrah, Achmad Muhammad Danyalin, Rakhmaditya Dewi Noorrizki, "Ketimpangan Ekonomi Berdampak pada Tingkat Kriminalitas? Telaah dalam Perspektif Psikologi Problematika Sosial", Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 7(2), 2021, 170-178, DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v7i2.35361>
- [64] Siti Nurul Yaqinah, "Resolusi Konflik Sosial Melalui Pendekatan Komunikasi Di Lingkungan Monjok dan Karang Taliwang Kota Mataram", Mediakita 3(1), 2019, 1-20
- [65] Novri Susan, "Pengantar Sosiologi Konflik", Prenadamedia Group Jakarta, 2014, h.109
- [66] Andri Wahyudi, "Konsep, Teori, dan Permasalahan Konflik", 2015, diakses pada laman <https://www.semanticscholar.org/author/A.-Wahyudi/150927853>
- [67] M. Alie Humaedi, "Kegagalan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Konflik Lampung", Jurnal "Analisa", 21(2), 2014, 149-162.
- [68] Soejono Sukanto, "Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi", Mitra Wacana Media Jakarta, 2014, h.56
- [69] Sri Widodo Mulyono, "Optimalisasi Kemampuan Deteksi Dini dan Mitigasi Risiko Konflik Oleh Satuan Koramil Dalam Pencegahan Terjadinya Konflik Sosial dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Koramil 05/Pasar Kliwon, Kodim 0735/Surakarta, Jawa Tengah)", Jurnal Ketahanan Nasional, 21(3), 2015, 188-196.
- [70] Jamil Gunawan, Sutoro Eko Yunanto, Anton Birowo, & Bambang Purwanto, "Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal", Pustaka LP3ES Indonesia Jakarta, 2005, h. 177.
- [71] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah
- [72] Ariko, Dedi, 2018. Tentang Apa Itu Realitas Dalam Kehidupan Manusia. (online), diakses pada <https://neurolism.web.id/> []
- [73] Hamri, Silatul, dkk., 2013. Model dan Pendekatan Kebijakan. Makalah Mata Kuliah Kebijakan Publik Program Pascasarjana Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. <https://rinastkip.wordpress.com/2013/03/28/337/> []

- [74] Hartanto, Shinta, 2022. Permodelan Sistem. (online), diakses pada <https://adoc.pub/>
- [75] Pratama, C. D., 2020. Masalah Sosial, Definisi dan Faktor Penyebabnya. (online), diakses pada <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/24/> []
- [76] <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/konflik-konflik-sosial-bernuansa-sara-di-berbagai-komunitas-studi-kasus-kerusuhan-mataram-januari-2000>.
- [77] <https://mataram.antaranews.com/berita/194121/polda-ntb-mendorong-pemerintah-bentuk-satgas-penanganan-konflik-sosial>.
- [78] <https://lombokpost.jawapos.com/lapsus/10/02/2021/10-tahun-ahyar-mohan-satukan-monjok-taliwang-dan-kr-genteng-petemon-2/>.
- [79] <https://dutaselaparang.com/gubernur-minta-warga-karang-taliwang-monjok-hidup-damai/>.
- [80] <https://hariannusa.com/2018/01/22/kronologis-bentrokan-monjok-mataram/>.
- [81] <https://www.suarantb.com/2018/01/30/janji-damai-warga-monjok-karang-taliwang/>.
- [82] <https://hariannusa.com/2017/12/11/kembali-bentrok-suasana-karang-taliwang-monjok-culik-mencekam/>.
- [83] <https://kabarntb.com/2018/03/konflik-antar-warga-lingkungan-monjok-culik-dan-karang-taliwang-jangan-terulang-lagi/>.
- [84] <https://issuu.com/suarantb/docs/snt18022016>.
- [85] <https://radarlombok.co.id/pemkot-mataram-terkesan-tak-bisa-tangani-konflik-monjok-taliwang.html>.